



**KEPUTUSAN BUPATI PATI**

**NOMOR : 050/3050 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN**

**PATI**

**TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021**



## BUPATI PATI

### KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 050/3050 TAHUN 2021

### TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PATI TAHUN 2022

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI PATI,

HARYANTO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sesuai Undang – undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2022 yang berisi perencanaan tahunan, daerah menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari penjangkauan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi, termasuk melalui penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Berdasarkan amanat tersebut di atas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2022.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kelautan dan Perikanan yang berisi program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati untuk dilaksanakan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen Perencanaan Tahunan dari Perangkat Daerah, sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2022 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pati tahun 2022.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada sejumlah peraturan-peraturan yang digunakan sebagai rujukan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 145)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 98);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

#### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah sebagai dokumen/acuan Perencanaan Kegiatan di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati untuk periode 1 (satu) tahun dan sinkronisasi dengan Program Prioritas Nasional serta Program Indikatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2022 terdiri dari:

#### **BAB I : PENDAHULUAN.**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V : PENUTUP.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara target dan capaian indikator baik indikator output maupun indikator outcome. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara target dan realisasi.

Hasil evaluasi dari rencana Kerja Tahun 2020 menunjukkan bahwa:

1. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 (sebanyak 14 program dan 55 kegiatan) dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 55 kegiatan, tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana. Secara umum realisasi capaian keuangan sebesar 97,77% dan untuk realisasi kinerja sebesar 99,72%, dengan predikat sangat tinggi;
2. Jumlah kegiatan tahun 2020 yang memenuhi target kinerja (penyerapan anggaran sebesar 91-100%) sebanyak 50 kegiatan, atau 90,91%, kegiatan yang memenuhi target kinerja penyerapan anggaran sebesar 76-90%) sebanyak 4 kegiatan, atau 7,27%, sedangkan kegiatan yang berada dibawah target kinerja (penyerapan anggaran kurang dari 75%) sebanyak 1 kegiatan, atau 1,82%;
3. Untuk kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya disebabkan karena Adanya sisa kontrak dan permasalahan pada administrasi kepegawaian;
4. Untuk mengatasi hal-hal tersebut dilakukan upaya lebih ditekankan bagi pelaksana kegiatan pada eselon terbawah (PPTK) untuk lebih teliti dalam perencanaan kegiatan dan penentuan jadwal kegiatan yang tepat, sehingga kendala yang ada dikemudian hari dapat dikurangi;
5. Untuk capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan s/d awal akhir tahun 2020 (awal Januari 2021) Secara umum rata-rata realisasi capaian kinerja kegiatan renstra sebesar 51,83% dengan target capaian

sebesar 60%. Capaian tersebut berada di bawah target yang telah direncanakan.

Uraian lengkap perkegiatan dapat dilihat di Tabel 2.1. yang merupakan rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah dan capaian renstra perangkat daerah.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra SKPD)	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun (2017 + 2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	<b>NON URUSAN</b>									
301.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100,00
301.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun.	5.500 surat	1.000	1.130	1.130	100,00	1.535	3.665	66,64
301.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Pembayaran Pajak	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun.	60 bulan	12	12	12	100,00	12	36	60,00
301.1.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah polis asuransi kesehatan PNS/Non PNS yang dibayarkan selama setahun.	1.080 polis asuransi kesehatan	60	228	102	44,74	-	162	15,00
301.1.06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun.	398 kendaraan dinas	64	66	66	100,00	68	198	49,75
301.1.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luasan areal objek kebersihan yang dibersihkan selama setahun.	60 bulan	12	12	12	100,00	12	36	60,00
301.1.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun.	469 unit	78	92	92	100,00	92	262	55,86
301.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kumulatif alat tulis kantor yang disediakan selama setahun.	13.242 unit	2.568	1.412	1.412	100,00	1.217	5.197	39,25
301.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar kumulatif barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan selama setahun.	208.128 Lembar	34.134	30.040	30.040	100,00	16.513	80.687	38,77
301.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun.	600 unit	96	82	82	100,00	80	258	43,00
301.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun.	92 unit	33	39	39	100,00	22	94	102,17
301.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun.	460 eksemplar	88	58	58	100,00	108	254	55,22
301.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kumulatif bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun.	211.800 unit	23.540	24.628	24.628	100,00	21.183	69.351	32,74

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
301.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disajikan selama setahun.	25.215 Porsi	4.977	3.245	3.244	99,97	5.339	13.560	53,78
301.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama setahun.	10.279 Kali	2.041	1.777	1.775	99,89	938	4.754	46,25
301.1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan yang disediakan selama setahun.	1.080 OB	198	228	228	100,00	240	666	61,67
301.1.20	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah penyelesaian administrasi pengadaan barang dan jasa selama setahun.	249 paket pekerjaan	40	40	40	100,00	42	122	49,00
301.1.22	Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang yang disediakan selama setahun.	660 OB	127	132	132	100,00	120	379	57,42
<b>301.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
301.2.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kumulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun.	10 unit	3	55	55	100,00	-	58	580,00
301.2.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah kumulatif mebeleur yang diadakan selama setahun.	48 unit	19	10	10	100,00	47	76	158,33
301.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor selama setahun.	3791 m2	523	733	733	100,00	433	1.689	44,55
301.2.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional selama setahun.	332 unit pemeliharaan	51	66	66	100,00	68	185	55,72
<b>301.3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase Kedisiplinan aparatur dalam berseragam dan kehadiran</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
301.3.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas/ olahraga/ hari-hari tertentu beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	515 stel	120	80	80	100,00	85	285	55,34
301.3.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah laporan e-presensi pegawai yang diadakan selama setahun	60 laporan	-	12	12	100,00	12	24	40,00
<b>301.5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Prosentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
301.5.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparaturnya yang mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang pejabat pengadaan dan Tim Pengelola Sistem Teknologi Informasi Online selama setahun.	66 orang	2	12	12	100,00	15	29	43,94
301.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketertiban pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100,00
301.6.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	25 laporan	5	5	5	100,00	5	15	60,00
301.6.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	5 laporan	1	1	1	100,00	1	3	60,00
301.6.05	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen dokumen rencana kerja (RENJA) SKPD yang disusun selama setahun	10 dokumen	2	2	2	100,00	2	6	60,00
301.6.06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun	20 dokumen	4	4	4	100,00	4	12	60,00
301.6.07	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan SKPD	Jumlah laporan perkembangan kegiatan SKPD yang disusun selama setahun	60 laporan	12	12	12	100,00	12	36	60,00
301.6.09	Penyusunan laporan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD selama setahun	4 laporan	-	1	1	100,00	1	2	50,00
301	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
301.301	BIDANG URUSAN: KELAUTAN DAN PERIKANAN									
301,15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	2,00 %	10,62	0,30	5,56	1.853,33	0,40	16,58	829,00
		Produksi garam	1.311.206,82 ton	320.228,58	232.725,02	350.761,32	150,72	255.429,90	926.419,80	70,65
301.15.01	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah kelompok pesisir yang dibina	24 Kelompok	4	4	4	100,00	5	13	54,17
301.15.08	Pengembangan usaha garam rakyat	Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina	680 petambak garam	-	120	120	100,00	250	370	54,41



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
301.16	Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	36,08 %	7,69	6,67	30,80	461,77	7,14	45,63	126,47
301.16.01	Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan	Jumlah POKMASWAS yang terbentuk	5 Pokmaswas	1	1	1	100,00	1	3	60,00
301.17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	0,71 %	6,90	0,09	0,33	366,67	0,09	7,32	1030,99
301.17.01	Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jarak tempuh patroli laut dalam satu tahun	6.450 Km	1.050	1.440	1.440	100,00	1.200	3.690	57,21
301.18	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Luasan eksisting lahan mangrove	935,17 Ha	184,74	180,43	225,39	124,92	185,77	596	63,72
301.18.01	Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi mitigasi bencana	4 dokumen	-	1	1	100,00	1	2	50,00
301.18.04	Pengembangan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Jumlah mangrove yang ditanam	141.680 batang	15.680	13.000	13.000	100,00	17.200	45.880	32,38
301.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	produksi perikanan budidaya	212.620 Ton	43.608	42.400	46.140,11	108,82	42.515	132.263	62,21
		<i>udang windu</i>	3.840 Ton	811,64	760	778,30	102,41	770	2.360	61,46
		<i>bandeng</i>	140.330 Ton	26.026,53	28.050	28.135,68	100,31	28.080	82.242	58,61
		<i>nila salin</i>	3.175 Ton	3.356,64	600	3.928,29	654,72	665	7.950	250,39
		<i>lele</i>	57.840 Ton	11.751,63	11.530	11.531,26	100,01	11.600	34.883	60,31
		<i>ikan lain</i>	7.435 Ton	1.661,60	1.460	1.766,58	121,00	1.520	4.948	66,55
301.20.01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul	17.600 ekor	1.600	4.000	4.000	100,00	4.000	9.600	54,55
301.20.02	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pendampingan	4.000 pembudidaya	600	700	700	100,00	710	2.010	50,25
301.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan	2.850 pembudidaya	200	300	300	100,00	360	860	30,18
301.20.41	Pengelolaan lingkungan dan pengendalian penyakit ikan	Jumlah pembudidaya yang terbina dalam masalah kesehatan ikan dan lingkungan pada pembudidaya ikan	4.300 pembudidaya	-	500	500	100,00	525	1.025	23,84
301.20.42	Pembinaan dan Pengelolaan Prasarana Budidaya	Jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan	2.175 pembudidaya	-	150	150	100,00	300	450	20,69

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
301.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham	129,21 %	30,77	23,00	47,06	204,61	25,00	103	79,58
		Volume ikan yang dilelang di TPI	142.826 Ton	23.517	28.228,71	34.768,82	123,17	28.511,00	86.797	60,77
301.21.01	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah KUB yang dibina	78 KUB	12	14	14	100,00	40	66	84,62
301.21.02	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI yang di bangun	3 TPI	1	1	1	100,00	1	3	100,00
301.21.03	Pemeliharaan rutin/ berkala Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI yang terpelihara dan terehab	8 TPI	1	2	2	100,00	2	5	62,50
301.21.05	Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap	Jumlah retribusi TPI	34,1 Milyar Rupiah	7,17	7,10	7,64	107,54	6,80	22	63,36
301.21.30	Pembangunan Kolam Pelabuhan/ Tempat Tambat Kapal Nelayan	Terbangunnya Kolam Pelabuhan untuk Tempat Tambat Kapal	100,0 %	-	15	15,00	100,00	3,00	18	18,00
301.21.31	Normalisasi Alur Pelayaran TPI	Jumlah lokasi normalisasi alur pelayaran TPI	8,0 Lokasi	-	1	1,00	100,00	1	2	25,00
301.21.32	Pengelolaan Sarana TPI	Jumlah pengadaan sarana TPI	3.900,0 unit	-	1.388,0	1.388,00	100,00	521	1.909	48,95
301.22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya	31,96 %	25,28	6,19	27,74	448,14	6,40	59	185,92
301.22.01	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah penyuluh perikanan yang terbina dan terlatih	280 Penyuluh	50,00	50	50	100,00	50	150	53,57
301.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi olahan ikan	211.511 Ton	115.448,40	42.090,64	126.444,60	300,41	42.301,10	284.194	134,36
		Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan	38,5 %	33,33	7,2	25,00	347,22	7,5	66	170,99
301.23.01	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan	7 dokumen	2,00	1	1	100,00	1	4	57,14
301.23.26	Pengembangan Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah diversifikasi produk olahan ikan yang dipraktekkan	30 resep	4,00	5	5	100,00	5	14	46,67
301.23.27	Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha kelautan dan perikanan	34 pelaku usaha	-	5	5	100,00	5	10	29,41
301.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas	100 %	100	100	106,55	106,55	100	307	306,55
301.24.01	Kajian Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kawasan budidaya perikanan	10 dokumen	2,00	1	1	100,00	1	4	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
301.24.16	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut dan Air Payau	Prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya laut dan air payau	75 %	10,00	10	10	100,00	-	20	26,67
301.24.17	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya air tawar	50 %	5,00	10	10	100,00	25	40	80,00

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati 2021..*

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisa kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisa kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator antara lain Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Capaian kinerja selama kurun waktu 2020-2021 capaian kinerja layanan OPD dapat dilihat dibawah ini;

1. Indikator Kinerja Pertama Pertumbuhan Produktivitas Komoditas Unggulan di Sektor Perikanan pada tahun 2020, target sebesar 3,49% dengan capaian sebesar 3,09%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belum memenuhi target. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan aktivitas disektor perikanan menurun;
2. Indikator Kinerja Kedua produktivitas perikanan tangkap pada tahun 2020, target sebesar 13,27 ton/kapal/tahun dengan capaian sebesar 60,17 ton/kapal/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target;
3. Indikator Kinerja Ketiga produktivitas perikanan budidaya pada tahun 2020, target sebesar 3,91 ton/ha/tahun dengan capaian sebesar 16,11 ton/ha/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target;
4. Indikator Kinerja Keempat produktivitas garam rakyat pada tahun 2020, target sebesar 89,45 ton/ha/musim produksi dengan capaian sebesar 66,62 ton/ha/musim produksi. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belum memenuhi target. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 dan banyaknya impor garam yang menyebabkan aktivitas produksi garam menurun;
5. Indikator Kinerja Kelima pertumbuhan angka konsumsi ikan pada tahun 2020, target sebesar 3,49% dengan capaian sebesar 0,31%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belum memenuhi target. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap olahan ikan menurun;

Pencapaian kinerja pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2020

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan (%)		5,53	2,53	3,31	3,49	4,08	5,53	85,47	3,09	4,08	5,53	
2	Produktivitas perikanan tangkap (ton/kapal/tahun)		13,53	13,16	13,21	13,27	13,39	13,53	26,83	60,17	13,39	13,53	
3	Produktivitas perikanan budidaya (ton/Ha/tahun)		3,93	3,90	3,90	3,91	3,92	3,93	16,04	16,11	3,92	3,93	
4	Produktivitas garam rakyat (ton/Ha/musim produksi)		114,3	74,54	81,5	89,45	99,39	114,30	120,88	66,62	99,39	114,30	
5	Pertumbuhan angka konsumsi ikan (%)		3,71	4,45	3,51	3,49	3,47	3,71	3,55	0,31	3,47	3,71	
6	Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		0,60%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%	0,60%	5,56%	1,84%	0,50%	0,60%	
7	Produksi garam		326.382,65 ton	212.858,25 ton	232.725,02 ton	255.429,90 ton	283.811 ton	326.382,65 ton	350.761,32 ton	193.307,04 ton	283.811,00 ton	326.382,65 ton	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
8	Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan		8.33%	6,25%	6.67%	7.14%	7,69%	8.33%	30,8	-11,11%	7,69%	8.33%	
9	Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan		0.26%	0,09%	0.09%	0.09%	0,18%	0.26%	0,33	0,19%	0,18%	0.26%	
10	Luasan eksisting lahan mangrove		199,98 Ha	176,88 Ha	180,43 Ha	185,77 Ha	192,11 Ha	199,98 Ha	225,39 Ha	247,801 Ha	192,11 Ha	199,98 Ha	
11	Pertumbuhan produksi garam		7.00%	7 %	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	produksi perikanan budidaya		42.775 ton	42,290 ton	42.400 ton	42.515 ton	42.640 ton	42,775 ton	46.140 ton	46.576 ton	42.640 ton	42,775 ton	
	<i>udang windu</i>		780	755	760	770	775	780	778	782	775	780	
	<i>bandeng</i>		28,100	28,040	28,050	28,060	28.080	28,100	28.136	28.276	28.080	28,100	
	<i>nila salin</i>		710	550	600	650	665	710	3.928	3.948	665	710	
	<i>lele</i>		11,650	11,510	11,530	11,550	11.600	11,650	11.531	11.578	11.650	11,650	
	<i>ikan lain</i>		1,535	1,435	1,460	1,485	1.520	1,535	1.767	1.992	1.520	1,535	
13	Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham		28.13%	23.08%	25.00%	25%	28%	28.13%	47,06%	28%	28%	28.13%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
14	Volume ikan yang dilelang di TPI		29.228,22 ton	28.004,67 ton	28.228,71 ton	28.511,00 ton	28.853,13 ton	29.228,22 ton	34.768,82 ton	30.363,39 ton	28.853.13 ton	29.228,22 ton	
15	Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	106,55%	100,20%	100%	100%	
16	Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya		7.18%	5,52%	6.19%	6.40%	6,67%	7.18%	27,74%	25,39%	6,67%	7.18%	
17	Produksi olahan ikan		42.725,17 ton	41.881,24	42.090,64 ton	42.301,10 ton	42.512,60 ton	42.725,17 ton	126.444,60 ton	83.364,66 ton	42.512,60 ton	42.725,17 ton	
18	Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan		8.70%	6.80%	7.20%	7.50%	8,30%	8.70%	25%	20%	8,30%	8.70%	

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Visi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik.”

Efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Bidang Kelautan dan Perikanan berkorelasi positif terhadap pencapaian Visi Kepala Daerah terpilih khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 dalam upaya untuk mewujudkan Visinya adalah:

- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
- e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
- f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mendukung dalam pencapaian misi yang ke enam yaitu Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri. Perikanan termasuk salah satu poin penting yang tidak terlepas dari pertanian. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dan merupakan hal yang kritis yang perlu segera ditangani yaitu permasalahan Produktivitas di sektor kelautan dan perikanan yang masih rendah baik itu produktivitas tangkap, budidaya maupun garam dan juga permasalahan Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan yang masih rendah. Peningkatan produktivitas komoditas perikanan dan pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan yang signifikan diharapkan mampu untuk menaikkan



daya saing daerah dan ikut berperan aktif dalam menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Pati. Faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan produktivitas komoditas perikanan maupun pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Pati antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
2. Kualitas produksi garam masih belum optimal;
3. Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan;
4. Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan;
5. Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove;
6. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
7. Masih banyak KUB nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham;
8. Pelayanan jasa pelelangan di TPI untuk mengoptimalkan volume ikan yang dilelang masih belum memadai;
9. Belum optimalnya produksi BBI dan tambak dinas;
10. Sebagian besar kelas kelompok pelaku utama perikanan masih merupakan kelas kelompok pemula;
11. Belum optimalnya produksi olahan ikan; dan
12. Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu satu tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

#### 1. Tantangan

Dari telaah Rencana Jangka Menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tantangannya adalah:

- a) Meningkatnya produksi sektor kelautan dan perikanan;
- b) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;

- c) Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana penunjang UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
- d) Meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat Kabupaten Pati;
- e) Terwujudnya pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif;
- f) Terwujudnya Sumberdaya Manusia (SDM) Dinas Kelautan dan Perikanan yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian;
- g) Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal, dan mudah diakses;
- h) Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- i) Terlaksananya pengujian mutu, pengawasan pengolahan hasil perikanan.

## 2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a. Ditetapkannya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai salah satu Dinas unggulan pembangunan lima tahun ke depan oleh Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. Adanya kebijakan Pemerintah (Permen KP No. 71) yang melarang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
- c. Adanya undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang melindungi kelestarian mangrove;
- d. Adanya unit-unit pendukung pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 8 TPI, 2 Tambak Dinas, 2 Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan 3 Balai Benih Ikan;
- e. Proses penetapan Wilayah Kecamatan Tayu sebagai sentra kawasan pembudidayaan ikan nila saline oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- f. Pembangunan Gudang Garam Kabupaten Pati yang berlokasi di Desa Raci Kecamatan Batangan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- g. Pembebasan lahan seluas 10 Ha di Desa Bakaran Wetan untuk pengembangan kolam pelabuhan sebagai sentra industry perikanan tangkap;
- h. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat;
- i. Globalisasi perdagangan baik dalam skala regional maupun internasional;
- j. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam melakukan review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD khususnya rancangan awal RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2022 terkait dengan pencapaian indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah serta penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan.

Pada saat proses penginputan program dan kegiatan banyak terdapat kegiatan-kegiatan baru yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, sehingga diperlukan penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan mengingat beberapa hal yang menjadi landasan perubahan yaitu :

1. Penyesuaian terhadap perkiraan kenaikan anggaran yang diterima OPD;
2. Kenaikan anggaran diutamakan pada kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat;
3. Melakukan efesiensi anggaran untuk kegiatan yang bersifat belanja aparatur.

Dari hasil perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah diperoleh hasil yaitu:

1. Dalam rancangan awal RKPD untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Yang menangani urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan bahwa terdapat 5 program, 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 18.527.398.000,- (Delapan belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dari hasil analisis kebutuhan bahwa untuk tahun 2022 dibutuhkan sebanyak 5 program, 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 13.150.131.000,- (Tiga belas milyar seratus lima puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. Pada hasil analisis kebutuhan ini tidak ada penambahan kegiatan;
3. Sedangkan terkait dengan penganggaran terdapat pengurangan.

Lebih jelasnya gambaran pelaksanaan review terhadap rancangan awal RKPD ini dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Ketertiban pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	7.758.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Ketertiban pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	6.709.621	
I.I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Ketertiban pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	107.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Ketertiban pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	99.230	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 dokumen	23.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 dokumen	23.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah dokumen perencanaan PD	1 dokumen	11.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah dokumen perencanaan PD	1 dokumen	11.500	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	jumlah dokumen perubahan rencana kerja (RKA) SKPD	1 dokumen	11.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	jumlah dokumen perubahan rencana kerja (RKA) SKPD	1 dokumen	11.500	
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 laporan	46.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 laporan	38.230	
05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah data kinerja yang terisi	55 jenis data	15.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah data kinerja yang terisi	55 jenis data	15.000	
I.II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Ketertiban pengembangan sistem pelaporan	100%	5.692.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Ketertiban pengembangan sistem pelaporan	100%	5.515.341	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			<b>capaian kinerja dan keuangan</b>					<b>capaian kinerja dan keuangan</b>			
06	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 dokumen	5.500.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 dokumen	5,333,799	
07	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	25 paket pekerjaan	75.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	25 paket pekerjaan	68,542	
08	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan PD	10 orang/bulan	105,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan PD	10 orang/bula n	103,000	
09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	12,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	10,000	
<b>I.III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase kedisiplinan aparatur dalam berseragam dan kehadiran</b>	<b>100%</b>	<b>158.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase kedisiplinan aparatur dalam berseragam dan kehadiran</b>	<b>100%</b>	<b>34.000</b>	
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85 stel	38.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85 stel	34.000	
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 pegawai	20.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 pegawai	0	
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	100.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
I.IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	662.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	277.423	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	80 unit	8.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	80 unit	3.979	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	50.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	30.000	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah bahan logistik kantor	22500 unit	245.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah bahan logistik kantor	22500 unit	120.000	
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	17725 lembar	18.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	17725 lembar	5.000	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	108 eksemplar	6.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	108 eksemplar	6.444	
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah kunjungan tamu	700 orang	20.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah kunjungan tamu	700 orang	5.000	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	210 notulen/la poran	295.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	210 notulen/la poran	100.000	
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah arsip dinamis	1 jenis	10.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah arsip dinamis	1 jenis	2.000	
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah layanan teknis berbasis e-gov	1 paket	10.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah layanan teknis berbasis e-gov	1 paket	5.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
I.V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	255.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	0	
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	2 buah	50.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	0 buah		
23	Pengadaan Mebel	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah mebel	8 unit	35.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah mebel	0 unit		
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah sarana atau prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	170.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah sarana atau prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0 unit		
I.VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	702.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	677.577	
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah surat yang terlayani	100 surat	7.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah surat yang terlayani	100 surat	1.000	
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	14 rekening	166.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	14 rekening	163.000	
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah jasa layanan umum	20 orang/bulan	530.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Jumlah jasa layanan umum	20 orang/bulan	513.577	
I.VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	181.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	106.050	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Prosentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	2 buah	130.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Prosentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	2 buah	66.050	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Prosentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	1 unit	51.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pati, Pati, Plangitan	Prosentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	1 unit	40.000	
II.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>volume ikan yang dilelang di TPI</b>	<b>29228,00 ton</b>	<b>11.800.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>volume ikan yang dilelang di TPI</b>	<b>29228,00 ton</b>	<b>5.319.150</b>	
II.I	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>volume ikan yang dilelang di TPI</b>	<b>29228,00 ton</b>	<b>5.800.000</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		volume ikan yang dilelang di TPI	29228,00 ton	200.003	
30	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah TPI yang dibangun Jumlah TPI yang terpelihara dan terehab Normalisasi alur pelayaran Pembangunan turap	1 TPI  1 TPI  242 m1  2 paket pekerjaan	5.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah TPI yang dibangun Jumlah TPI yang terpelihara dan terehab Normalisasi alur pelayaran Pembangunan turap	1 TPI  1 TPI  242 m1  2 paket pekerjaan	100.000	
31	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Paket pekerjaan penyediaan sarana TPI	4 paket pekerjaan	800.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Paket pekerjaan penyediaan sarana TPI	4 paket pekerjaan	100.003	
II.II	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>pertumbuhan KUB nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham</b>	<b>28,13 %</b>	<b>2.100.000</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>pertumbuhan KUB nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham</b>	<b>28,13 %</b>	<b>1.618.00</b>	
32	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah nelayan yang terbina	6474 orang	600.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pertumbuhan KUB nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham	6474 orang	40.370	
33	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah paket pencairan dana kesejahteraan nelayan dan jaminan	5856 paket bantuan	1.500.000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pertumbuhan KUB nelayan aktif yang berbadan hukum	5856 paket bantuan	1.577.630	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					Rp. (000)					Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			sosial keselamatan bagi nelayan (asuransi)			Kemitraan Usaha		kemenkumham			
II.III	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>volume ikan yang dilelang di TPI</b>	<b>29228,00 ton</b>	<b>3.900.000</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>				<b>3.501.147</b>	
34	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan operasional TPI	12 bulan	3.900.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	volume ikan yang dilelang di TPI	12 bulan	3.501.147	
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>produksi perikanan budidaya</b>	<b>42775 ton</b>	<b>3.355.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>produksi perikanan budidaya</b>	<b>42775 ton</b>	<b>941.360</b>	
III.I	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>		<b>persentase kelompok pelaku utama perikanan madya</b>	<b>7,18 %</b>	<b>490.000</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>		<b>persentase kelompok pelaku utama perikanan madya</b>	<b>7,18 %</b>	<b>125.000</b>	
35	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pendampingan	600 orang	250.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kelompok pelaku utama perikanan madya	600 orang	100.000	
36	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyuluh perikanan yang terbina dan terlatih	52 orang	240.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kelompok pelaku utama perikanan madya	52 orang	25.000	
III.II	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>		<b>produksi perikanan budidaya</b>	<b>42775 ton</b>	<b>2.865.000</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>		<b>produksi perikanan budidaya</b>	<b>42775 ton</b>	<b>816.360</b>	
37	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah informasi budidaya perikanan	1 dokumen	25.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah informasi budidaya perikanan	1 dokumen	20.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
38	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembangunan prasarana kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Pembinaan pemanfaatan prasaran budidaya	1 BBI 50 orang	1.500.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembangunan prasarana kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Pembinaan pemanfaatan prasaran budidaya	1 BBI 50 orang	100.360	
39	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul	110023 ekor	600.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul	110023 ekor	216.000	
40	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembudidaya yang terlayani masalah kesehatan ikan dan lingkungan	500 orang	120.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembudidaya yang terlayani masalah kesehatan ikan dan lingkungan	500 orang	70.000	
41	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan	350 pembudidaya	250.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan	350 pembudidaya	230.000	
42	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bibit mangrove yang tertanam Jumlah dokumen mitigasi bencana Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	4414 batang 1 dokumen 80 orang	170.000	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bibit mangrove yang tertanam Jumlah dokumen mitigasi bencana Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	4414 batang 1 dokumen 80 orang	80.000	
43	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pati, Batangan, Semua Kelurahan Kab. Pati, Juwana, Semua Kelurahan Kab. Pati, Wedarijaksa, Semua Kelurahan Kab. Pati,	Dokumen garam rakyat Jumlah petambak garam yang terlatih dan terbina	10 buku 1500 orang	200.000	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Pati, Batangan, Semua Kelurahan Kab. Pati, Juwana, Semua Kelurahan Kab. Pati, Wedarijaksa, Semua Kelurahan Kab. Pati,	Dokumen garam rakyat Jumlah petambak garam yang terlatih dan terbina	10 buku 1500 orang	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
		Trangkil, Semua Kelurahan					Trangkil, Semua Kelurahan				
IV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	0,26 %	100.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	0,26 %	45.000	
IV.I	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	0,26 %	100.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	0,26 %	45.000	
44	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jarak tempuh patroli Pembinaan POKMASWAS	1200 km 8 Pokmaswas	100.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jarak tempuh patroli Pembinaan POKMASWAS	1200 km 8 Pokmaswas	45.000	
V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		produksi olahan ikan	42725,17 ton	355.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		produksi olahan ikan	42725,17 ton	135.000	
V.I	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		produksi olahan ikan	42725,17 ton	25.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		produksi olahan ikan	42725,17 ton	20.000	
45	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah daerah yang dipetakan dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan	21 Kecamatan	25.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah daerah yang dipetakan dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan	21 Kecamatan	20.000	
V.II	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		produksi olahan ikan	42725,17 ton	300.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil		produksi olahan ikan	42725,17 ton	85.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	<b>Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>					<b>Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>					
46	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah diversifikasi produk olahan ikan yang dipraktekan	5 resep	300.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah diversifikasi produk olahan ikan yang dipraktekan	5 resep	85.000	
<b>V.III</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		produksi olahan ikan	42725,17 ton	<b>30.000</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		produksi olahan ikan	42725,17 ton	<b>30.000</b>	
47	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemohon izin usaha skala mikro	80 pelaku usaha	<b>30.000</b>	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemohon izin usaha skala mikro	80 pelaku usaha	<b>30.000</b>	
<b>JUMLAH</b>					<b>23.368.000</b>					<b>13.150.131</b>	

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui pelaksanaan musrenbangdes dan musrenbang RKPD kecamatan, khususnya program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan *pilihan dengan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan* untuk usulan tahun 2022 *ada* yang terdiri atas 1 usulan yang berasal dari 1 fraksi dan dikelompokkan menjadi 1 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2022  
Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Desa Puri Pati	Bantuan peralatan poklahsar FF Jaya	25.000.000	Diakomodir

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kerangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan”. Selanjutnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu “Mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-1 dan ke-4, serta menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kedaulatan.
- 2) Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan keberlanjutan.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta



menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kesejahteraan.

- 4) Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang kompeten dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang inovatif. Arah kebijakan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan 3 misi yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
- 5) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Arah kebijakan ini ditetapkan sejalan dengan program Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengajukan program/ kegiatan pendukung kebijakan nasional sebagai wujud partisipasi dalam mendukung program Pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam hal ini mensejahterakan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan adalah terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber-sumber dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian, tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah **"Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan"** dengan target Pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan pada Renja tahun 2022 sebesar 4,08%.

### **3.2.2. Sasaran**

Dalam mewujudkan tujuan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati merumuskan 2 sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya produksi komoditas unggulan di sektor kelautan dan perikanan dengan target renja 2022 yaitu peningkatan Produktivitas perikanan tangkap sebesar 13,39 ton/kapal/tahun, peningkatan Produktivitas perikanan budidaya sebesar 3,92 ton/ha/tahun, dan peningkatan Produktivitas garam rakyat sebesar 99,39 ton/ha/tahun;
- b. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan perkapita penduduk dengan target renja 2022 yaitu peningkatan Pertumbuhan angka konsumsi ikan sebesar 3,47%.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memiliki dasar-dasar pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan untuk Tahun anggaran 2022. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut diantaranya adalah untuk pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pencapaian visi dan misi Bupati Pati serta menunjang pengentasan kemiskinan. Rumusan program dan kegiatan ini berpedoman pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam masa periode 2017-2022.

Untuk tahun 2022, ada beberapa program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian arah dan tujuan pembangunan nasional maupun daerah antara lain:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, akan didukung melalui program:
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
  - 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - 6. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
  - 1. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - 2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - 1. Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil
  - 2. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  - 1. Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
  - 1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
  - 2. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- b. Pengelolaan Pembudidaya Ikan;
  - 1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 5. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
  - 6. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
  - 7. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

- 4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota;
    1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- 5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil ;
    1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
    1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penererapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
  - c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    1. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Untuk tahun 2022 ini pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terdapat sebanyak 5 program, 16 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 13.150.131.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 6 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 6.709.621.000,-;
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 5.319.150.000,-;
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri atas 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 941.360.000,-;
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 45.000.000,-;

- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 135.000.000,-;

Program kegiatan tersebut tersebar di seluruh Kabupaten Pati dengan fokus kawasan di 7 wilayah Kecamatan Pesisir dengan stake holder sasaran masyarakat Kabupaten Pati pada umumnya dan khususnya para pelaku usaha perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pengecer hasil perikanan dan masyarakat pelaku usaha perikanan lainnya.

Pada rancangan akhir ini tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan rancangan awal. Pagu indikatif di rancangan awal renja sebesar Rp. 23.368.000,- dan pada rancangan akhir renja juga sebesar Rp. 13.150.131.000,-.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan awal RKPD Tahun 2022 dibahas pada forum Perangkat Daerah untuk disesuaikan lagi jenis program/kegiatan berdasarkan lokasi peruntukan dan pagu anggaran yang dibutuhkan mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Rancangan RKPD yang telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah inilah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022.

#### **3.4. Program yang mendukung Penanganan/ Revitalisasi Covid – 19**

Untuk program yang direncanakan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dalam upaya mendukung penanganan/ Revitalisasi Covid – 19 di Kab. Pati, dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan baik bagi Nelayan, Pembudidaya ikan, Bakul/ Pengolah Ikan dan petani garam, Program dan Kegiatan tersebut adalah :

a. Program Pengolahan Perikanan Tangkap;

1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Dalam kegiatan ini mendukung dalam memfasilitasi peningkatan kuantitas SDM melalui kegiatan pembinaan nelayan.

- Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha

Dalam sub kegiatan ini juga memfasilitasi Penyediaan dan bantuan sosial nelayan dan Premi Asumsi bagi pelaku Nelayan aktif di Wilayah Kabupaten Pati.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil dalam kegiatan ini direncanakan mendukung peningkatan pemberdayaan pelaku pembudidaya ikan baik dari aspek pembinaan, pelatihan dan fasilitasi peningkatan kualitas nilai jual bagi pembudidaya ikan baik di Budidaya Air Payau maupun Air Tawar.

2. Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

Dalam kegiatan ini direncanakan mendukung peningkatan dan pemberdayaan kualitas garam bagi petani garam baik melalui pembinaan dan fasilitasi terhadap pengembangan usaha garam rakyat.

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Dalam kegiatan ini mendukung dalam memfasilitasi peningkatan kualitas hasil perikanan melalui pelaku pengolahan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha pengolahan dan bakul ikan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan masyarakat pelaku usaha perikanan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Program dan kegiatan untuk tahun 2022 secara umum sebagai berikut:

#### **4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD;
  - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
  - b) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
  - c) Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan.



4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - c) Penyediaan bahan logistik kantor;
  - d) Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan;
  - e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - f) Fasilitasi kunjungan tamu;
  - g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
  - h) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
  - i) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - a) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  - b) Pengadaan mebel;
  - c) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat;
  - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - c) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  - b) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

#### 4.2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
  - a. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap;
  - b. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap.
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pengembangan kapasitas nelayan kecil;

- b. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha.
- 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
  - a. Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
- 4.3 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - 1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
    - a. Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
    - b. Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
  - 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
    - a. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
    - b. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
    - c. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
    - d. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
    - e. Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
    - f. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat ;
    - g. Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
- 4.4 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - 1. Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.
    - a. Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.
- 4.5 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
    - a. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

2. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
  - a. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
3. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk pendanaan dalam rancangan akhir renja ini bersumber dari APBD Kabupaten Pati sebesar Rp. 13.150.131.000,- atau 100%, Selanjutnya lebih jelas terkait dengan Rencana Kerja dan kerangka pendanaan dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

## Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan				13.150.131.000				26.254.000.000
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				6.709.621.000				8.352.000.000
3.25.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Ketertiban pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DKP	100 %	99.230.0000			100 %	1140.000.000
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pati	2 dokumen	23.000.000	DAU		2 dokumen	25.000.000
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja (RKA) SKPD	Kab. Pati	1 dokumen	11.500.0000	DAU		1 dokumen	12.000.000
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja (RKA) SKPD	Kab. Pati	1 dokumen	11.500.000	DAU		1 dokumen	12..000.000
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Pati	18 laporan	38.230.000	DAU		18 laporan	48..000.000
3.25.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah data kinerja yang terisi	Kab. Pati	55 jenis data	15.000.000	DAU		55 jenis data	17..000.000
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan kinerja keuangan yang disajikan	DKP	100 %	5.515.341000	DAU		100 %	6.203.000.000
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pati	12 dokumen	5.333.799.000	DAU		12 dokumen	6..000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pati	25 paket pekerjaan	68.542.000	DAU		25 paket pekerjaan	8.500.000
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan PD	Kab. Pati	10 orang/bulan	103.000.000	DAU		10 orang/bulan	108.000.000
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Pati	1 laporan	10.000.000	DAU		1 laporan	15.000.000
<b>3.25.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase kedisiplinan aparatur dalam berseragam dan kehadiran</b>	<b>DKP</b>	<b>100 %</b>	<b>154.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>350.000.000</b>
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Pati	85 stel	34.000.000	DAU		85 stel	40.000.000
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Pati	0 pegawai	0	DAU		0 pegawai	25.000.000
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pati	0 orang	0	DAU		0 orang	110.000.000
<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>DKP</b>	<b>100 %</b>	<b>277.423.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>692.000.000</b>
3.25.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Pati	80 unit	3.979.000	DAU		80 unit	10.000.000
3.25.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pati	5 unit	30.000.000	DAU		5 unit	60.000.000
3.25.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Kab. Pati	22.484 unit	120.000.000	DAU		22.484 unit	250.000.000
3.25.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Kab. Pati	17.721 lembar	5.000.000	DAU		17.721 lembar	20.000.000
3.25.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Pati	108 eksemplar	6.444.000	DAU		108 eksemplar	7.000.000
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	Kab. Pati	700 orang	5.000.000	DAU		700 orang	21.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	Kab. Pati	210 notulen/laporan	10.000.000	DAU		210 notulen/laporan	300.000.000
3.25.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis	Kab. Pati	1 jenis	2.000.000	DAU		1 jenis	12.000.000
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah layanan teknis berbasis e-gov	Kab. Pati	1 paket	5.000.000	DAU		1 paket	12.000.000
<b>3.25.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	<b>271.000.000</b>
3.25.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	Kab. Pati	0 buah	0	DAU		0 buah	60.000.000
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Kab. Pati	0 unit	0	DAU		0 unit	36.000.000
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pati	0 unit	0	DAU		0 unit	175.000.000
<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100 %</b>	<b>677.577.000</b>			<b>100 %</b>	<b>710.000.000</b>
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani	Kab. Pati	100 surat	1.000.000	DAU		100 surat	8.000.000
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	Kab. Pati	14 rekening	163.000.000	DAU		14 rekening	167.000.000
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum	Kab. Pati	20 orang/bulan	513.577.000	DAU		20 orang/bulan	535.000.000
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kab. Pati</b>	<b>100 %</b>	<b>106.050.000</b>			<b>100 %</b>	<b>187.000.000</b>
3.25.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	Kab. Pati	2 buah	66.050.000	DAU		2 buah	135.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Pati	1 unit	40.000.000	DAU		1 unit	52.000.000
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Volume ikan yang dilelang di TPI</b>		<b>29228 Ton</b>	<b>5.319.150.000</b>			<b>29228 Ton</b>	<b>13.050.000.000</b>
<b>3.25.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Volume ikan yang dilelang di TPI</b>		<b>29228 Ton</b>	<b>200.003.000</b>			<b>29228 Ton</b>	<b>6.850.000.000</b>
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah TPI yang dibangun Jumlah TPI yang terpelihara dan terehab Normalisasi alur pelayaran Pembangunan Kolam pelabuhan Pembangunan turap	Kab. Pati	1 TPI 1 TPI 242 m 1 paket pekerjaan 2 paket pekerjaan	100.000.000	DAU		1 TPI 1 TPI 242 m 1 paket pekerjaan 2 paket pekerjaan	6.000.000.000
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket pekerjaan penyediaan sarana TPI	Kab. Pati	4 paket pekerjaan	100.003.000	DAU		4 paket pekerjaan	850.000.000
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pertumbuhan KUB nelayan aktif yangb berbadan hukum kemenkumham</b>		<b>28 %</b>	<b>1.618.000.000</b>			<b>28 %</b>	<b>2.200.000.000</b>
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang terbina	Kab. Pati	6474 orang	484.000.000	DAU		6474 orang	600.000.000
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	Jumlah paket pencairan dana kesejahteraan nelayan dan jaminan social keselamatan bagi nelayan (asuransi)	Kab. Pati	5856 paket bantuan	1.134.000.000	DAU		5856 paket bantuan	1.600.000.000
<b>3.25.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Volume ikan yang dilelang di TPI</b>		<b>28853 Ton</b>	<b>3.501.147.000</b>			<b>28853 Ton</b>	<b>4.000.000.000</b>
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penyelenggaraan operasional TPI	Kab. Pati	12 bulan	3.501.147.000	DAU		12 bulan	4.000.000.000
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Prosentase kelompok pelaku utama perikanan madya</b>		<b>7,18 %</b>	<b>941.360.000</b>			<b>7,18 %</b>	<b>4.327.000.000</b>
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Prosentase kelompok pelaku utama perikanan madya</b>		<b>6,67 %</b>	<b>125.000.000</b>			<b>6,67 %</b>	<b>500.000.000</b>
3.25.04.2.02.01	Pengembangan kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pendampingan	Kab. Pati	600 orang	100.000.000	DAU		600 orang	250.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah penyuluh perikanan yang terbina dan terlatih	Kab. Pati	52 orang	25.000.000	DAU		52 orang	250.000.000
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Produksi perikanan budidaya</b>		<b>42640 ton</b>	<b>816.360.000</b>			<b>42640 ton</b>	<b>3.827.000.000</b>
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi budidaya perikanan	Kab. Pati	1 dokumen	20.000.000	DAU		1 dokumen	27.000.000
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan prasarana kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Pembinaan pemanfaatan prasarana budidaya	Kab. Pati	1 BBI 50 orang	100.360.000	DAU		1 BBI 50 orang	2.000.000.000
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul	Kab. Pati	110023 ekor	216.000.000	DAU		110023 ekor	850.000.000
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan yang terlayani masalah kesehatan ikan dan lingkungan	Kab. Pati	500 orang	70.000.000	DAU		500 orang	200.000.000
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan	Kab. Pati	350 pembudidaya	230.000.000	DAU		350 pembudidaya	300.000.000
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah bibit mangrove yang tertanam Jumlah dokumen mitigasi bencana Jumlah masyarakat pesisir yang terbina	Kab. Pati	4414 batang 1 dokumen 80 orang	80.000.000	DAU		4414 batang 1 dokumen 80 orang	200.000.000
3.25.04.2.04.07	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dokumen garam rakyat Jumlah petambak garam yang terlatih dan terbina	Kab. Pati, Batangan, Juwana, Wedarijaksa, Trangkil,	10 buku 1500 orang	100.000.000	DAU		10 buku 1500 orang	250.000.000
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan</b>		<b>0,26 %</b>	<b>45.000.000</b>			<b>0,26 %</b>	<b>150.000.000</b>
<b>3.25.05.2.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan</b>		<b>0,18 %</b>	<b>45.000.000</b>			<b>0,18 %</b>	<b>150.000.000</b>



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pembinaan POKMASWAS	Kab. Pati	8 pokmaswas	45.000.000	DAU		8 pokmaswas	150.000.000
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Produksi olahan ikan</b>		<b>42725,17 ton</b>	<b>135.000.000</b>			<b>42725,17 ton</b>	<b>375.000.000</b>
3.25.06.2.01	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Produksi olahan ikan</b>		<b>42725,17 ton</b>	<b>20.000.000</b>			<b>42725,17 ton</b>	<b>30.000.000</b>
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang dipetakan dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan	Kab. Pati	21 kecamatan	20.000.000	DAU		21 kecamatan	30.000.000
3.25.06.2.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Produksi olahan ikan</b>		<b>42725,17 ton</b>	<b>85.000.000</b>			<b>42725,17 ton</b>	<b>310.000.000</b>
3.25.06.2.02	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah diversifikasi produk olahan ikan yang dipraktekkan	Kab. Pati	5 resep	85.000.000	DAU		5 resep	310.000.000
3.25.06.2.03	<b>Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan</b>		<b>8,3%</b>	<b>30.000.000</b>			<b>8,3%</b>	<b>35.000.000</b>
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemohon izin usaha skala mikro	Kab. Pati	80 pelaku usaha	30.000.000	DAU		80 pelaku usaha	35.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 khususnya tahun 2022. Rencana kerja ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, program dan kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2022.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan renja perangkat daerah ini perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi setiap triwulannya. Selanjutnya jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2022 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2022. Diharapkan semua sumber daya perangkat daerah terkait dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja aparatur.

BUPATI PATI,

HARYANTO